

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- M. Handi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Jonker Sihombing, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, (Jakarta:Ref Publisher, 2013)
- Sirajuddin dan Winard, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta : UAI Press, 2018)
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Lampung:Universitas Bandar Lampung Press, 2019)
- Serlika Aprita, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Makassar : CV Pena Indis, 2017)
- J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, (Surabaya : Laksbang Justitia, 2015)
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang : Semarang University Press, 2008)
- Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2020)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Ed.1, Cet.3*, (Depok : Rajawali Press, 2020)

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan* (Tangerang : Universitas Pelita Harapan, 2021)

JURNAL/TESIS

Sentosa Sembiring, “Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan”, *ADHAPER*, Vol. 3, No. 1 Januari 2017, 98. DOI: [10.36913/jhaper.v3i1.4](https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i1.4)

Litari Elisa Putri dan St. Laksanto Utomo, “Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 Februari 2021, 99. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.8>.

Luthvi Febryka Nola, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No. 2 November 2019, 155. DOI : [10.22212/jnh.v10i2.1348](https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1348)

Anis Nur Nadhiroh, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja”, *Notaire*, Vol. 2, No. 3 Oktober 2019, 313. DOI : <http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16237>

Muhamad Abas, “Hak Mendahului Upah Pekerja Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 jo No. 67/PUU-XI/2013), *Buana Ilmu*, Vol. 3, No. 1 November 2018, 161. DOI : [10.36805/bi.v3i1.464](https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.464)

Imran Eka Saputra, “Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2 November 2020, 160-161. DOI: [10.36805/bi.v3i1.464](https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.464)

Novitasari, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.39, No.2 Agustus 2017, 91. DOI : <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02>

Arijna Nurin Sofia, “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurist-Diction*, Vol.3, No. 4 Juli 2020, 1422. DOI : <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>

Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana*, Vol.12, No. 2 Juli 2018, 146. DOI : <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>

Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol.36, No.2 September 2020, 20. DOI : <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>

Arihta Esther Tarigan dan Syafrida, "Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.8, No.2 April 2021, 620-626. DOI : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20363>

Shafira Hijriya, "Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang Pajak dalam Kasus Kepailitan", *Nagari Law Review*, Vol.1, No.1 Oktober 2017, 34. DOI : <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.1.i.1.p.33-55.2017>

Adeline Laureen Turangan, "Kedudukan Upah dan Hak-Hak Lain Pekerja Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013", *TALENT Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts*, Vol.1 No.1 Oktober 2018, 157-158. DOI : <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.157>

Calvin Morris, "Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt,Sus-Renvoi/Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)". Tesis, Medan: Progra m Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, 30 Januari 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Niaga Surabaya Nomor Putusan Nomor: 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby jo. No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Safitri Haryani Saptogino, Kurator dan Advokat, *Zoom Meeting*, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.00 WIB

